

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN MITIGASI EKONOMI DAMPAK PANDEMI COVID-19 DI KABUPATEN KUDUS PROVINSI JAWA TENGAH

Muhammad Nashruddin Rosyad
NPP.29.0825

Asdraf Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah
Program Studi Politik Indonesia Terapan

Email: 29.0825@praja.ipdn.ac.id

ABSTRACT (in english)

Problem/Background (GAP): The COVID-19 pandemic that has hit the world has had a major impact on almost all sectors, especially the economic sector. Kudus Regency as one of the industrial cities and one of the regencies that experienced a surge in the number of covid-19 in the second wave experienced a contraction of economic growth by -3.53 percent in 2020. This is a challenge for the Kudus Regency Government to implement economic mitigation policies due to the pandemic. covid-19. **Objective:** This study aims to determine the policies of the Kudus Regency Government in handling the contraction of the economic downturn and its policies in raising MSMEs affected by the COVID-19 pandemic. **Methods:** This study uses descriptive qualitative research methods. Data collection techniques were carried out by interviews, and documentation. The data analysis technique used is data reduction, data presentation and conclusion drawing. **Results/Findings:** The results of the study show that the Kudus Regency Government optimizes community empowerment in carrying out economic mitigation by optimizing the jogo tonggo program. Efforts to improve the economy are focused on providing business support, especially MSMEs in order to survive and develop. Structuring the tourism sector is also carried out to revive the people's economy. This policy succeeded in creating a trend of economic growth in Kudus. There was an increase in the number of MSME actors by 300% with 1,800 new MSMEs during the pandemic, which was proven to be able to reduce the poverty rate in Kudus compared to the previous year. **Conclusion:** the success of the economic mitigation policy in Kudus is due to the people's economic approach, the active participation of the community and the effective and intense communication carried out by the government.

Keywords: Economic Mitigation, MSMEs, Covid-19 Pandemic

ABSTRAK (in bahasa)

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Pandemi covid-19 yang melanda dunia memberikan dampak yang besar di hampir semua sektor terutama sektor ekonomi. Kabupaten Kudus sebagai

salah satu kota industri dan salah satu kabupaten yang mengalami lonjakan angka covid-19 pada gelombang kedua mengalami kontraksi pertumbuhan ekonomi sebesar -3,53 persen pada tahun 2020. Hal ini menjadi tantangan bagi Pemerintah Kabupaten Kudus untuk mengimplementasikan kebijakan mitigasi ekonomi dampak pandemi covid-19. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan Pemkab Kudus dalam penanganan kontraksi penurunan ekonomi serta kebijakannya dalam membangkitkan UMKM yang terdampak pandemi COVID-19. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, serta dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemkab Kudus mengoptimalkan pemberdayaan masyarakat dalam melakukan mitigasi ekonomi dengan mengoptimalkan program joko tonggo. Upaya peningkatan ekonomi difokuskan pada pemberian dukungan usaha terutama UMKM agar tetap survive dan berkembang. Penataan sektor pariwisata juga dilakukan untuk menghidupkan kembali ekonomi rakyat. Kebijakan ini berhasil membuat tren pertumbuhan ekonomi di Kudus. Terjadi peningkatan jumlah pelaku UMKM sampai 300% dengan 1.800 UMKM baru selama masa pandemi, yang terbukti dapat menurunkan angka kemiskinan di Kudus dibanding tahun sebelumnya. **Kesimpulan:** Keberhasilan kebijakan mitigasi ekonomi di Kudus karena menggunakan pendekatan ekonomi kerakyatan, adanya peran serta aktif masyarakat serta komunikasi yang dilakukan pemerintah secara efektif dan intens.

Kata kunci : Mitigasi ekonomi, UMKM, Pandemi Covid-19

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengklasifikasikan wabah virus corona COVID-19 sebagai pandemi global pada 11 Maret 2020. Dampak yang ditimbulkan oleh pandemi Covid-19 menjadi tantangan bagi mayoritas negara di dunia. Dampak yang paling dirasakan oleh negara-negara berkembang adalah krisis ekonomi. Permintaan global yang mengalami penurunan seiring dengan gangguan rantai pasokan menimbulkan krisis ekonomi yang cukup parah melalui perdagangan, keuangan, dan harga komoditas (DESA, 2020).

Pandemi Covid-19 di Indonesia memberikan dampak yang sangat signifikan, hampir semua sektor utama terdampak bukan hanya bidang kesehatan. Dampak di bidang sosial ekonomi merupakan dampak yang paling krusial. Dampak ini sangat besar, bersifat multisektoral dan akan terlihat dalam jangka waktu yang lama (Yamali & Putri, 2020: 386).

Pemerintah Indonesia mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 9 tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) untuk melakukan percepatan penanganan pandemi Covid-19. Kepres ini mengatur kementerian/lembaga untuk melakukan refocussing kegiatan dan realokasi anggaran serta memuat tugas pelaksana gugus tugas percepatan penanganan Covid-19. Setelah virus Covid-19 dinyatakan sebagai bencana non alam melalui

Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020, pemerintah mengeluarkan kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) melalui Peraturan Presiden Nomor 21 tahun 2020 pada beberapa wilayah.

Selain upaya untuk mengatasi pandemi Covid-19, pemerintah juga membutuhkan tindakan tegas untuk mengurangi dampak ekonomidan sosial yang ditimbulkan oleh pandemi Covid-19 serta melindungi daerah yang paling rentan (Outlook, 2020).

Kudus sebagai kabupaten yang pernah menduduki posisi tertinggi peningkatan angka kejadian Covid-19 di Indonesia pasca lebaran memiliki tugas berat untuk mempercepat penurunan angka Covid-19 sekaligus mengurangi dampak akibat pandemi terutama pada dampak ekonomi. Perekonomian Kabupaten Kudus yang ditopang oleh wisatawan terdampak secara signifikan selama masa pandemi. Warga Kabupaten Kudus mengalami PHK dan output yang lebih rendah akibat permintaan masyarakat terhadap produk pelaku usaha terdampak pandemi Covid-19. Agar langkah meminimalisir angka Covid-19 dengan PSBB tidak berdampak ekonomi bagi Pemerintah Kabupaten Kudus, kebijakan yang tepat harus diterapkan.

Dibandingkan dengan kabupaten lain di sekitar kabupaten kudus, Kabupaten Kudus telah terbukti menjadi contoh yang sangat baik tentang cara cepat mengurangi jumlah Covid-19. Salah satu strategi Kabupaten Kudus adalah menumbuhkan budaya gotong royong antar warga. Kabupaten Kudus tetap harus bekerja keras untuk menekan angka COVID-19 sekaligus juga menghadapi dampak dari pandemi tersebut, khususnya di bidang ekonomi yang terdampak luar biasa.

Beberapa inisiatif telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kudus untuk mengurangi dampak ekonomi dari wabah tersebut. Pandemi Covid-19 dan dampaknya akan ditangani sesuai dengan kebijakan mitigasi dampak ekonomi, yang berfungsi sebagai landasan dan pedoman. Kebijakan pemerintah ini harus dicermati karena jika tidak fokus pada akar permasalahan dan tidak dilaksanakan dengan mempertimbangkan wabah Covid-19 saat ini, pemerintah tidak akan berdaya untuk menghentikan penyebaran Covid-19 dan masyarakat. dampak pandemi akan semakin parah.

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Lonjakan Covid-19 di Kabupaten Kudus pasca lebaran memberikan dampak yang signifikan bagi masyarakat Kabupaten Kudus. Dampak ini bukan hanya dibidang kesehatan, tetapi dampak multifaktor terutama di bidang ekonomi. Pemerintah Kabupaten Kudus telah berhasil menurunkan angka Covid-19 dengan cepat sehingga menjadi percontohan penanganan Covid bagi kabupaten di sekitar Kudus. Namun tugas pemerintah kabupaten Kudus tidak cukup berhenti pada penanganan Covid saja karena dampak yang ditimbulkan dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kudus. Kudus yang perekonomiannya sangat ditunjang oleh industri mengalami imbas yang sangat besar. Kabupaten Kudus mengalami kontraksi penurunan ekonomi minus 3,03 persen akibat pandemi Covid-19. Risiko penurunan ekonomi dampak dari pandemi ini harus segera ditangani dengan kebijakan dari pemerintah Kabupaten Kudus.

1.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini dilakukan tidak lepas dari hasil penelitian-penelitian sebelumnya yang pernah ditulis sebagai karya ilmiah guna bahan perbandingan sekaligus pedoman penulis. Penelitian sebelumnya

menjadi acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang akan dilakukan. Pertama, penelitian Engkus, dkk (2020) yang berjudul Covid-19: Kebijakan Mitigasi Penyebaran Dan Dampak Sosial ekonomi di Indonesia. Menemukan bahwa kebijakan yang tidak menempatkan keseriusan pada fokus masalah dan tidak terukur dalam rangka penanganan wabah covid 19, pemerintah tidak akan mampu meminimalisir kematian akibat virus corona 2019 (COVID19).) dan dampak sosial ekonomi dari penyebaran virus akan sangat dalam dan serius. Kedua, penelitian oleh Umi Khaerah Pati (2020) yang berjudul *Indonesian Government Policy in Mitigating Economic Risks Due to The Impact of The Covid- 19 Outbreak*. Menemukan bahwa Indonesia menghadapi efek domino ekonomi dari covid-19 dan Bank Indonesia (BI) telah mengambil beberapa langkah dengan memperkuat koordinasi kebijakan dengan pemerintah dan otoritas lainnya untuk menstabilkan nilai tukar rupiah dan memitigasi dampak dari Risiko Covid-19 terhadap perekonomian domestik.

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu. Penelitian yang dilakukan oleh penulis menggunakan keadaan dan informan yang baru dan berbeda dengan lokus pada Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah.

1.5 Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan Pemkab Kudus dalam penanganan konstruksi penurunan ekonomi serta kebijakannya dalam membangkitkan UMKM yang terdampak pandemi COVID-19.

II. METODE

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif dan pendekatan induktif untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang dialami subyek penelitian dari masalah yang terjadi (Creswell, 2016:3). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi yang didapat dari sumber data primer dan sekunder dengan narasumber dari Kepala Bappeda Kabupaten Kudus (1 orang), Anggota DPRD Kudus (1 orang), Kepala Desa Cendono (1 orang), Teknis analisis data dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Permasalahan dibahas menggunakan teori Implementasi Kebijakan Edward III dalam Subarsono (2012:90) dengan dimensi Kondisi Lingkungan, Hubungan Antar Organisasi, Sumber Daya, Karakter Institusi Implementor.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Implementasi Kebijakan Mitigasi Ekonomi Dampak Pandemi Covid-19 di Kabupaten Kudus

Pandemi covid-19 membawa dampak pada mata pencaharian, ketahanan pangan, dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kudus. Meskipun sebagian besar masyarakat dapat bertahan, namun akibat adanya penurunan order memaksa perusahaan dan juga UMKM mengistirahatkan karyawannya,

terutama bagi pekerja kontrak atau harian. Pandemi covid-19 juga menjadi pukulan yang besar bagi beberapa UMKM di Kabuapten Kudus.

Secara umum, implementasi kebijakan mitigasi ekonomi dampak pandemi covid-19 di Kudus diawali dengan melakukan kebijakan percepatan penanganan covid-19 dengan melakukan 3T dan menerapkan 5M secara ketat. Keberhasilan pelaksanaan kebijakan percepatan penanganan covid-19 di Kudus tidak dapat terlepas dari peran serta aktif seluruh lapisan masyarakat melalui program *jogo tonggo* dan *jogo santri* serta program desa siaga covid-19.

Pemerintah Kabupaten Kudus menetapkan rencana strategis untuk masyarakat yang terkena dampak dari pandemi Covid-19 sesuai panduan yang tertulis pada RPJMD. Pemerintah Kabupaten Kudus mengambil langkah-langkah antisipatif dan responsif, dengan menjaga daya beli masyarakat dan mendorong aktivitas produktif melalui penyalurkan bantuan sosial tepat sasaran, membangkitkan dan mengembangkan UMKM, membantu meningkatkan investasi dengan menyusun peraturan tata ruang Kabupaten Kudus, menghidupkan kembali sektor pariwisata yang pada masa pandemi mengalami penutupan, serta mendorong program padat karya tunai dalam pembangunan dan/atau rehabilitasi sarana prasarana perdesaan.

Implementasi kebijakan mitigasi ekonomi Pemerintah Kabupaten Kudus ditekankan pada pembinaan dan pengembangan UMKM. Penguatan UMKM ini terbukti dapat mengembangkan UMKM di Kabupaten Kudus sehingga terjadi peningkatan jumlah pelaku UMKM sampai 300% dengan 1.800 UMKM baru selama masa pandemi, yang terbukti dapat menurunkan angka kemiskinan di Kudus dibanding tahun sebelumnya.

3.2. Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Kebijakan Mitigasi Ekonomi di Kabupaten Kudus

Faktor Pendorong dan Faktor Penghambat yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan Mitigasi Ekonomi Dampak Pandemi Covid- 19 di Kabupaten Kudus adalah komunikasi, sumber daya, sikap, dan struktur birokrasi. Komunikasi yang dilakukan secara efektif dan intens dalam memberikan sosialisasi secara transparan menjadi kunci keberhasilan kebijakan ini. Sumber daya yang memiliki kemampuan ditambah dengan pemberdayaan masyarakat dengan melibatkan para tokoh masyarakat dan tokoh agama meningkatkan kepercayaan publik terhadap kebijakan yang diambil pemerintah.

3.3. Kebijakan Mitigasi Ekonomi Kabupaten Kudus

- Menyalurkan bantuan sosial tepat sasaran
- Membangkitkan dan mengembangkan UMKM
- Membantu meningkatkan investasi dengan menyusun peraturan tata ruang Kabupaten Kudus.
- Menghidupkan sektor pariwisata yang pada masa pandemi mengalami penutupan.
- Mendorong program padat karya tunai dalam pembangunan dan/atau rehabilitasi sarana prasarana perdesaan, pemanfaatan lahan tidur untuk meningkatkan produksi pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan atau kegiatan produktif lainnya.

3.4. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Peneliti menemukan bahwa Pemerintah Kabupaten Kudus menetapkan rencana strategis untuk masyarakat yang terkena dampak dari pandemi Covid-19 sesuai panduan yang tertulis pada RPJMD. Pemerintah Kabupaten Kudus mengambil langkah-langkah antisipatif dan responsif, dengan menjaga daya beli masyarakat dan mendorong aktivitas produktif melalui penyalurkan bantuan sosial tepat sasaran, membangkitkan dan mengembangkan UMKM, membantu meningkatkan investasi dengan menyusun peraturan tata ruang Kabupaten Kudus, menghidupkan kembali sektor pariwisata yang pada masa pandemi mengalami penutupan, serta mendorong program padat karya tunai dalam pembangunan dan/atau rehabilitasi sarana prasarana perdesaan. Berbeda dengan temuan Engkus, dkk (2020) bahwa kebijakan yang tidak menempatkan keseriusan pada fokus masalah dan tidak terukur dalam rangka penanganan wabah covid 19, pemerintah tidak akan mampu meminimalisir kematian akibat virus corona 2019 (COVID19).) dan dampak sosial ekonomi dari penyebaran virus akan sangat dalam dan serius (Engkus et al., 2020).

Dalam penelitian diketahui bahwa Pemkab Kudus mengambil beberapa kebijakan antara lain Menyalurkan bantuan sosial tepat sasaran, Membangkitkan dan mengembangkan UMKM, Membantu meningkatkan investasi dengan menyusun peraturan tata ruang Kabupaten Kudus, Menghidupkan sektor pariwisata yang pada masa pandemi mengalami penutupan, Mendorong program padat karya tunai dalam pembangunan dan/atau rehabilitasi sarana prasarana perdesaan, pemanfaatan lahan tidur untuk meningkatkan produksi pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan atau kegiatan produktif lainnya. Layaknya temuan Umi Khaerah Pati (2020) bahwa Indonesia menghadapi efek domino ekonomi dari covid-19 dan Bank Indonesia (BI) telah mengambil beberapa langkah dengan memperkuat koordinasi kebijakan dengan pemerintah dan otoritas lainnya untuk menstabilkan nilai tukar rupiah dan memitigasi dampak dari Risiko Covid-19 terhadap perekonomian domestik (Pati, 2020).

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan peneliti menyimpulkan bahwa keberhasilan kebijakan mitigasi ekonomi di Kudus karena menggunakan pendekatan ekonomi kerakyatan, adanya peran serta aktif masyarakat serta komunikasi yang dilakukan pemerintah secara efektif dan intens.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Serta penelitian hanya pada wilayah tertentu yang mudah dijangkau.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan implementasi kebijakan ekonomi pasca covid-19 di Kabupaten Kudus.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terimakasih kepada Kepala Bappeda Kabupaten Kudus beserta jajaran, seluruh dosen pengajar, pembimbing dan penguji juga seluruh pihak yang terlibat dalam penelitian ini.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Creswell, J. W. (2016). *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. PT. Pustaka Pelajar.
- Engkus, E., Suparman, N., Tri Sakti, F., & Saeful Anwar, H. 2020. Covid- 19: Kebijakan Mitigasi Penyebaran dan Dampak Sosial Ekonomi di Indonesia. Artikel KTI UIN Sunan Gunung Jati. <http://digilib.uinsgd.ac.id/30820/>
- Hertinawati, H. 2021. Analisa terhadap Kebijakan Fiskal dan Moneter Indonesia dalam Menghadapi Wabah Pandemi Covid-19. *Jurnal SEKURITAS (Saham, Ekonomi, Keuangan Dan Investasi)*, 4(2), 118–130.
- Outlook, O. E. 2020. OECD Economic Outlook. *Oecd Economic Outlook*, 2020(2), 499–533.
- PWC. 2020. Our COVID-19 response Global Annual: Review 2020.
- Outlook, O. E. 2020. OECD Economic Outlook. *Oecd Economic Outlook*, 2020(2), 499–533.

